

MENGGAGAS URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Fitri Yanti

ABSTRAK

Krisis multi dimensi yang dilakukan pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya ini menghadirkan suatu pertanyaan bagi beberapa kalangan mahasiswa, kenapa mereka para pemimpin bertingkah laku sangat menyimpang dari tatanan kehidupan di negeri yang berazaskan Pancasila ini, disamping itu para pemimpin ini adalah orang-orang yang mendapat pendidikan Pancasila sampai ke perguruan tinggi.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan tanah air Indonesia, maka pendidikan pancasila dibutuhkan di perguruan tinggi dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang isinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus dari dini dikenalkan dan diajarkan kepada manusia Indonesia termasuk di Perguruan Tinggi. Sebagai pembentuk intelektual yang bermoral ketuhanan dan kemanusiaan..

PENGANTAR

Tulisan ini disajikan berangkat dari munculnya suatu keprihatinan moral yang dalam atas terjangkitnya beberapa kalangan termasuk segolongan mahasiswa oleh penyakit "**alergi Pancasila**" di era reformasi. Hal ini dikarenakan telah terjadinya berbagai krisis di Indonesia dengan merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan serta perilaku penguasa yang sewenang-wenang di masa orde baru.

Krisis multi dimensi yang dilakukan pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya ini menghadirkan suatu pertanyaan bagi beberapa kalangan mahasiswa, kenapa mereka para pemimpin bertingkah laku sangat menyimpang dari tatanan kehidupan di negeri yang berazaskan Pancasila ini, disamping itu para pemimpin ini adalah orang-orang yang mendapat pendidikan Pancasila sampai ke perguruan tinggi.

Dari pernyataan tersebutlah, tulisan sederhana ini berusaha menampilkan kembali pemahaman terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara serta bagaimana sebenarnya urgensi pendidikan Pancasila diperguruan tinggi.

A. Rasionalisasi Pendidikan Pancasila

Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup generasi penerusnya sebagai bangsa dan negara. Pendidikan yang berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) akan membuat manusia mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa

berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional.

Menurut Deding Ishak Ibnu dalam tulisannya manajemen pendidikan (2006), pendidikan secara universal berarti upaya pengubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kecerdasan disini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan mengenai kehidupan ekonomi bangsa yang cerdas, kehidupan religius bangsa yang cerdas, kehidupan politik bangsa yang cerdas, dan seterusnya. Kehidupan bangsa yang cerdas ini esensinya adalah manusia-manusia individual, personal yang cerdas. Untuk itu pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai kehidupan dinamis yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan.

Agar dapat hidup berguna dan bermakna, setiap warga negara harus mendapat pembekalan ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lain yang kesemua itu harus berlandaskan pada nilai-nilai agama, dan budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian kepada peserta didik dilakukan salah satunya melalui pendidikan pancasila. Penumbuhan kesadaran, sikap, dan prilaku yang bersendikan nilai-nilai pancasila dalam diri setiap warga negara Indonesia yang menguasai ipteks merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan pancasila. Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping pada tingkat mutu dan penguasaanya. Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup akan benar-benar menjadi sikap dan prilaku warga negara bila ia dapat merasakan bahwa pancasila adalah yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan didukung UU. No 2 tahun 1989 bahwa isi pendidikan yang memuat pendidikan pancasila harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara

Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkannya dalam segala prilaku hidup, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia kristalisasi nilai-nilai tersebut terdapat dalam Pancasila, yang sebelum dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila telah menjadi nilai luhur budaya yang dikenal dengan sifat-sifat ***tepo seliro, tepo tulodo, tepo polupi*** (suka bekerja keras, tolong menolong, gotong royong, kasih dan sebagainya) yang ditelah diwariskan dari kerajaan nasional Indonesia seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya dan kerajaan Majapahit.

Sebagai pandangan hidup bangsa, maka pancasila berisikan:

1. Konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan,
2. Pikiran dan gagasan-gagasan yang mendalam mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik oleh bangsa.

Sedangkan perlunya pandangan hidup ini karena:

1. Untuk mengetahui kearah mana tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa,
2. Untuk memandang setiap masalah yang dihadapi,
3. Untuk dipakai sebagai pedoman menentukan arah, serta bagaimana bangsa tersebut memecahkan masalah yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju, yang meliputi masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan,
4. Pedoman dalam membangun diri.

Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa ini diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan kenegaraan. Walaupun dalam perumusannya mengalami proses perjalanan yang cukup panjang yang diawali dengan pertanyaan yang diajukan Dr. Radjiman Wedioningrat tentang apakah dasar negara yang akan dipakai apabila kita memiliki negara yang jawabannya dikemukakan oleh Mr. Moch Yamin, Prof. Soepomo dan Ir. Soekarno melalui beberapa kali sidang BPUPKI namun rumusan terakhir Pancasila yang benar dan berlaku sampai sekarang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Ketuhanan merupakan nilai inti atau sumber untuk nilai-nilai yang terdapat dalam sila berikutnya, sehingga dikatakan juga masing-masing sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila lainnya.

Dari uraian diatas, berkaitan dengan fenomena yang dihadapi, maka yang terpenting adalah bagaimana memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan, karena tanpa pengamalan Pancasila hanya merupakan rangkaian kata-kata indah

yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, seperti yang telah terjadi pada masa orde baru. Dengan demikian sebenarnya tidaklah layak kalau ada mahasiswa yang terjangkit penyakit “alergi pancasila” karena orang-orang yang tidak bisa mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya.

C. PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan tanah air Indonesia, maka pendidikan pancasila dibutuhkan di perguruan tinggi dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang isinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi nomor 38/Dikti/Kep/2002 tanggal 18 juli 2002 tentang pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi dan sesuai dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *pertama*, prilaku yang memancarkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, *kedua*, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradap, *ketiga*, prilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beragam, kebudayaan dan kepentingan, *keempat*, prilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat maupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah serta *kelima*, prilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pendidikan pancasila, diharapkan juga para mahasiswa memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa secara berkesinambungan dan konsisten, dengan cita-cita dan tujuan nasional. Disamping itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai hati nurani serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Untuk kelancaran pengajaran pendidikan pancasila diperguruan tinggi ini maka materi-materi yang diajarkan dituangkan dalam suatu garis besar proses pembelajaran GBPP dan pemberian silabus pada mahasiswa.

D. PEMBAHASAN

Bukan suatu rahasia lagi ketika korupsi, kolusi dan nepotisme menjamur di era Orde Baru. Ini terjadi karena sistim yang salah dalam semua bidang. Seolah-olah pejabat pemerintah dan biokrat tidak ada kontrol dan pengawasan dalam mengambil dan menjalankan suatu kebijakan. Bagaimana ketika fenomena ini dikaitkan dengan pendidikan

pancasila? Secara formal pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dimana semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diambil dari nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian isi dari pancasila telah menyentuh semua aspek kehidupan bangsa. Penyelewengan terjadi ketika para pejabat atau biokrat tidak mengindahkan lagi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah, sehingga KKN semakin subur di zaman orde baru

Memang tidak mudah merubah perilaku negatif yang telah subur di Indonesia, karena asumsi-asumsi pembangunan yang dianut sejak orde baru yaitu asumsi-asumsi pembangunan yang mengabaikan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Misalnya sampai sekarangpun masih banyak orang beranggapan bahwa jika perundang-undangan politik dan hukum sudah direformasi maka masyarakat akan segera berubah sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut. Faktanya ternyata tidak demikian. Pada tingkat implementasinya di lapangan banyak hambatan yang menghadang karena ditingkat implementasi perundang-undangan tersebut menghadapi manusia-manusia yang belum berubah.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas sebagai dharma pertama yakni melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka tugas dari pendidikan tinggi adalah, pertama menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Kedua, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk itu sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup pancasila, intelektual produk perguruan tinggi berupaya untuk mewujudkan sumber daya intelektual yang bermoral Ketuhanan dan kemanusiaan. Intinya adalah perguruan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual, biokrat, pakar dan profesional lainnya yang bermoral Ketuhanan yang mengabdikan pada kemanusiaan sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil terutama pemerintah tidak lari dari nilai-nilai pancasila, begitu juga dalam perundang-perundangan. Karena diyakini perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu jika pelaksanaannya konsisten akan mengubah manusia-manusia Indonesia.

E. Kesimpulan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus dari dini dikenalkan dan diajarkan kepada manusia Indonesia termasuk di Perguruan Tinggi. Sebagai pembentuk intelektual

yang bermoral ketuhanan dan kemanusiaan.. Kalau pendidikan pancasila ditiadakan asumsi penulis itu sangat mustahil karena ketika pendidikan pancasila ini masih diajarkan ternyata masih belum menyerap dihati bangsa Indonesia, apalagi jika pendidikan pancasila ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Poerwanti, dkk, 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. Universitas Muihamadiyah Malang, Malang
- H.A.W Widjaja, 2002. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi*. Raja Grafindo Persada
- Kaelan, M.S, 2004. *Pendidikan Pancasila "Edisi Reformasi"*. Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, M.S, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma, Yogyakarta.
- Pamoe Rahardjo, dkk, 2002. *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*, Galang Printika, Yogyakarta.
- Mustafa Kamal Pasha, dkk, 2002. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*,.Kuasa Mandiri, Yogyakarta
- Pandji Setijo, 2006. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa dan Amandemen UUD 1945*. Gramedia, Jakarta.
- Redja Mudyaharjo, 2002. *Filsafat ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.